



# Proyek UPS Rugikan Negara Rp 50 Miliar

**KERUGIAN** negara akibat korupsi dalam proyek pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) dari APBD Perubahan DKI 2014 setidaknya mencapai Rp 50 miliar. Hal tersebut disampaikan Kasubdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, AKBP Ajie Indra selaku pimpinan tim yang menangani kasus tersebut.

"Taksiran kerugian negara akibat tindak korupsi itu mencapai Rp 50 miliar. Namun untuk kepastian angka kerugiannya kami masih menunggu hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) yang sedang bekerja," terangnya di Markas Polda (Mapolda) Metro Jaya, kemarin (17/3).

Menurutnya juga, dalam pemeriksaan terhadap para saksi tim penyidikinya mencium adanya *mark-up* harga dalam setiap pengadaan unit UPS tersebut. Namun sekali lagi untuk kepastian berapa nilai *mark-up* yang dilakukan para pelaku dalam setiap unit UPS, polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap para saksi-saksi.

"Memang ada dugaan *mark-up*, ini yang sedang kami dalami terus terhadap setiap para saksi. Termasuk mendalami setiap dokumen yang ada. Kami juga sedang mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lelang UPS itu, termasuk dokumen dari Dinas Pendidikan DKI dan Suku Dinas Pendidikan Menengah (Dikmen) Jakarta Pusat dan Jakarta Barat," terang Ajie.

Terkait pengumpulan dokumen pelanggan UPS ini, menurut Ajie untuk mendalami dimana saja letak korupsinya. Diungkapnya pula, dari setiap satu paket UPS terbagi ke dalam 3 rekening, rinciannya 8 rak untuk satu paket UPS senilai Rp 208 juta, instalasi senilai Rp 2,9 miliar, dan unit UPS-nya sendiri senilai Rp 2,5 miliar.

"Nah, dari ketiga rekening itu totalnya satu paket kurang lebih sekitar Rp 5,6 miliar. Ini semua yang sedang kami dalami untuk mengetahui berapa besar harga yang di mark up itu," beber Ajie. Dia menambahkan, pihaknya saat ini masih terus memeriksa setiap saksi secara intensif, termasuk bersama auditor dari BPKP meneliti setiap dokumen yang ada.

Sayangnya perwira menengah Polri itu belum bisa mengumumkan siapa saja

yang sudah dinaikkan statusnya menjadi terduga dalam kasus ini. "Sabarlah, kami dalami dulu secara keseluruhan agar komprehensif. Walaupun alat buktinya sudah cukup, tapi gak bisa satu persatu. Kalau sudah diperiksa secara menyeluruh, tentu akan kami sampaikan siapa tersangkanya. Tunggu tanggal mainnya saja," pungkas Ajie.

Sementara itu, masih di Mapolda Metro Jaya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Martinus Sitompul memastikan kalau pihaknya segera memanggil beberapa anggota DPRD DKI Jakarta, khususnya yang duduk di Komisi E DPRD DKI Bidang Kesra yang membawahi Pendidikan periode 2009-2014, yang dinilai sangat tahu terkait kasus korupsi dalam proyek pengadaan puluhan unit UPS itu.

"Pasti mereka akan kami panggil, karena (proyek) itu pasti melibatkan dewan," terangnya. Terkait belum juga adanya tersangka, menurut Martinus, pihaknya mendalami keterangan dari yang lain. "Meskipun keterangan saksi, surat petunjuk, keterangan ahli dan alat bukti sudah dipegang penyidik. Meskipun dari hasil pemeriksaan saksi-saksi sudah ada yang patut diduga dan terindikasi untuk dijadikan tersangka. Sekali lagi kami harus mendalami keterangan saksi secara utuh dan menyeluruh," ujarnya. (ind)